

PERMASALAHAN, KENDALA DAN CARA MENGATASI PELBAGAI ASPEK YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UMR PADA SEKTOR INDUSTRI SEPATU

Ihen Ngim Tu, Sc., MBA

Pendahuluan

Dengan berhasilnya perundingan Putaran Uruguay dan ditandatanganinya GATT pada tahun 1994 serta berdirinya World Trade Organization, maka dunia memasuki babak baru, yakni babak perdagangan bebas dalam sistem perdagangan internasional. Pembaharuan dalam sistem perdagangan internasional ini menyebabkan bentuk pasar hampir mendekati persaingan sempurna artinya produk yang diperdagangkan akan lebih homogen dan informasi harga yang ditawarkan telah diketahui dengan baik atau harga telah merupakan suatu datum. Dengan demikian, produsen atau penjual tidak bisa berbuat banyak, dengan perkataan lain, produsen/penjual harus menjual dengan harga yang bisa diterima oleh pembeli yang sudah menjadi *public information*.

Apabila harga yang ditawarkan kepada para pembeli lebih tinggi daripada harga yang ingin mereka bayar, dengan sendirinya akan menyebabkan barang yang diproduksi tidak lagi kompetitif. Untuk itu, hal yang harus diperhatikan oleh produsen dalam menghadapi persaingan global adalah menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif dari produk sejenis yang dihasilkan produsen (negara) lain. Sebuah perusahaan akan dapat menghasilkan produk yang lebih murah dibandingkan produk sejenis dari para pesaingnya,

apabila perusahaan tersebut telah bekerja secara efisien, sehingga harga pokoknya lebih rendah daripada produk sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Sejalan dengan efisiensi dalam menghasilkan suatu produk adalah produktivitas kerja dari para pekerja. Penting sekali bagi sebuah perusahaan untuk mempelajari struktur industri dan struktur biaya dari para pesaingnya, sehingga perusahaan tersebut dapat memproduksi suatu produk dengan harga yang lebih kompetitif.

Jika kita amati secara cermat, negara maju kehilangan keunggulan komparatifnya dalam menghasilkan produk yang harus menggunakan teknologi padat karya, seperti industri tekstil dan produk tekstil, sepatu dan sebagainya. Kehilangan keunggulan komparatif ini disebabkan oleh tingginya upah pekerja yang harus dibayar. Harus diakui, kenaikan upah pekerja akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan di suatu negara, akan tetapi kenaikan kemakmuran dan kesejahteraan tersebut harus dibayar dengan harga tertentu pula, yakni merosotnya bahkan kemungkinan hilangnya keunggulan komparatif dalam menghasilkan produk, terutama produk yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi padat karya. Masih bagus kalau perubahan keunggulan komparatif tersebut bisa diimbangi dengan kemajuan industri yang menggunakan teknologi padat modal, dengan demikian negara tersebut masih

bisa mencapai kemajuan/pertumbuhan ekonomi yang pesat.

UMR 1995 dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 389/MEN/1994 tertanggal 28 Desember 1994 menetapkan UMR 1995, untuk daerah Jakarta dan Botabek sebesar Rp4.600,00.

Keputusan ini akan mulai berlaku pada 1 April 1995. Kenaikan UMR dari Rp3.800,00 menjadi Rp4.600,00 berarti suatu kenaikan sebesar 21%. Angka kenaikan ini cukup tinggi, jauh di atas tingkat inflasi yang untuk tahun 1994 mencapai 9,87%. Banyak pihak menyambut baik kenaikan UMR ini, dengan harapan para pekerja dapat terangkat taraf kehidupannya dan kesejahteraannya.

Sementara itu, banyak sekali keluhan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia masih relatif rendah. Menurut Ketua DPA Sudomo, kondisi lapangan kerja Indonesia sudah mengkhawatirkan, dan yang perlu diperhatikan adalah peningkatan produktivitas. Data BPS yang dikemukakan oleh beliau menunjukkan hanya 44 juta orang angkatan kerja yang benar-benar baik produktivitasnya. Kalau penduduk Indonesia berjumlah 180 juta orang, berarti seorang pekerja yang produktif menanggung 4 jiwa lainnya.

Pengaruh Kenaikan UMR terhadap Industri Sepatu

Industri sepatu merupakan industri padat karya. Kenaikan UMR berpengaruh langsung terhadap daya saing harga sepatu Indonesia di pasaran ekspor. Upah tenaga kerja sebagai unsur biaya produksi sedikit banyak tergantung dari model sepatu yang dibuat. Model sepatu dengan komponen *upper* (bagian atas) yang banyak sudah tentu membutuhkan waktu jahit yang lebih lama. Demikian pula *outsole* tiga atau empat warna membutuhkan waktu proses yang lebih lama daripada *outsole* satu warna. Dalam penyederhanaan perhitungan biaya produksi, maka upah tenaga kerja diambil secara pukul rata menjadi suatu angka tertentu. Dengan asumsi seperti di atas, maka upah tenaga kerja untuk membuat sepasang sepatu dianggap tetap, sedangkan biaya bahan baku merupakan biaya variabel yang tergantung pada model sepatu, dengan demikian unsur upah sebagai persentase dari biaya produksi sepasang sepatu berkisar antara 16,48% sampai 23,22%. Maka dapat dilihat bahwa unsur upah, bila dinyatakan dalam persen dari jumlah biaya produksi, menjadi dominan bila nilai sepatu yang diproduksi bernilai jual rendah. Tetapi sebaliknya, peranan unsur upah berkurang bila sepatu yang dihasilkan mempunyai nilai jual tinggi.

Masalah lain yang timbul dengan adanya kenaikan UMR adalah gejala yang dikenal dengan istilah *sundulan*. Dengan adanya UMR baru, pekerja yang baru bekerja dua tiga bulan akan menerima upah Rp4.600,00 sedang pekerja yang lebih lama yang tadinya, sebelum kenaikan UMR menerima Rp4.200,00 (di atas UMR lama), setelah kenaikan UMR akan menerima upah yang sama Rp4.600,00. Hal ini sulit dihindari dalam industri padat karya di mana *turnover* selalu terjadi. Untuk mengatasi *sundulan* ini pengusaha membayar upah yang lebih besar daripada UMR kepada pekerja lama bila tidak ingin terjadi gejolak di perusahaannya.

Setelah kami amati, kenaikan upah akibat kenaikan UMR mengubah angka persentase unsur upah menjadi 19,94% sampai 28,10% atau terjadi kenaikan antara 3,46% sampai 4,88%. Dalam angka absolut, kenaikan ini sebesar US\$0,50 (lima puluh sen) per pasang sepatu.

Perlu kita ketahui suatu kenaikan biaya pembuatan sepatu sebesar US\$0,50 (lima puluh sen) sulit sekali diterima oleh pembeli merek-merek terkenal. Kenaikan ini cukup besar dan cukup menyulitkan bagi pabrik sepatu, karena pabrik sepatu tidak bisa menaikkan harga jual begitu saja. Produk akan menjadi tidak kompetitif lagi jika dibandingkan dengan produk dari negara lain. Agar upah sebagai unsur biaya produksi tetap dalam persentase atau lebih kecil, maka harga sepatu yang dihasilkan harus mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Pabrik sepatu harus berusaha memperoleh pesanan sepatu dengan teknologi yang lebih tinggi, sehingga dapat dijual dengan harga (FOB) yang lebih tinggi pula. Beberapa pabrik sepatu mungkin akan menghadapi kesulitan, karena belum siap membuat sepatu berteknologi tinggi yang memang membutuhkan peralatan dan teknologi khusus. Demikian pula ada kemungkinan kendala tidak tersedianya tenaga kerja yang terampil untuk mengimbangi kenaikan upah tenaga kerja; dengan demikian pabrik mutlak mengadakan penghematan di segala bidang. Banyak orang berpendapat bahwa penghematan berarti pengurangan tenaga kerja; hal ini adalah salah karena tidak akan memecahkan masalah. Penghematan berarti meningkatkan efisiensi dalam hal pembelian dan penggunaan bahan baku, meningkatkan produktivitas dan *output*, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Penghematan juga dapat dilakukan terhadap unsur-unsur biaya yang tidak secara langsung mempengaruhi biaya produksi sepatu, seperti misalnya biaya *air freight* bahan baku dengan perencanaan yang lebih baik. Pengurangan biaya bunga misalnya dengan pemanfaatan *Usance L/C* dan masih banyak cara lain yang dapat ditempuh. Dan cara ini sudah seharusnya dilakukan secara berkesinambungan, karena sudah merupakan tugas dari pengusaha pabrik sepatu.

Optimal Resource Allocation

Sebenarnya, memaksimalkan upah pekerja bukanlah merupakan tujuan akhir dari seorang pekerja, apalagi bagi pemerintah. Tingginya upah yang dibayarkan kepada seorang pekerja hanyalah merupakan akibat dan bukan sebab. Tingginya upah yang dibayarkan akan sangat ter-

gantung dari besarnya kontribusi yang telah diberikan oleh seorang pekerja dalam proses produksi. Semakin tinggi kontribusi yang diberikan oleh seorang pekerja, dengan sendirinya akan diikuti dengan meningkatnya tingkat upah yang diterimanya. Bila ditinjau dari pihak pengusaha, maka setiap faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi harus diperlakukan sama, yakni bagaimana dengan *input* tertentu akan dihasilkan *output* yang maksimal. Pengusaha tidak mempunyai kendali untuk melakukan diskriminasi terhadap *input* yang dipergunakannya dalam proses produksi. Apa yang dilakukan oleh para pengusaha hanyalah merupakan konsekuensi logis dari konsep *optimal resource allocation* dan disebabkan oleh *market force*. Pengusaha harus menggunakan sumber daya ekonomi atau faktor produksi yang dimilikinya secara efisien agar tetap dapat bertahan hidup. Efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi atau faktor produksi, termasuk di dalamnya tenaga kerja, dalam proses produksi merupakan suatu situasi yang unik. Unik karena tidak semua kombinasi dari *input* merupakan suatu kombinasi yang akan memaksimalkan *return* dari investasi yang telah dilakukan oleh pengusaha. Apabila kombinasi dari sumber daya ekonomi atau faktor produksi tidak optimal, maka akibatnya adalah dihasilkannya suatu produk dengan tingkat harga yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Apabila hal ini terjadi, maka pada akhirnya pihak konsumenlah yang harus memikul atau membayar setiap inefisiensi yang dilakukan oleh pengusaha yang tidak memperhatikan *optimal resource allocation*. Dengan demikian harga produk yang harus dibayar oleh konsumen adalah lebih mahal daripada yang seharusnya, maka peningkatan upah yang dilakukan tidak meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan para pekerja, karena *income constraints* terhadap *utility function* para pekerja akan semakin tinggi. Situasi ini pada akhirnya akan menyebabkan jumlah barang yang dapat dikonsumsi oleh seorang konsumen akan sama atau bahkan lebih kecil dengan adanya tambahan upah. Jadi tingkat kesejahteraan tidak hanya tergantung pada naiknya tingkat upah, akan tetapi juga akan sangat tergantung pada tingkat inefisiensi yang terjadi, karena adanya penggunaan sumber daya ekonomi

(dalam hal ini faktor tenaga kerja) yang tidak optimal.

Jadi kenaikan UMR secara berkala untuk mengejar KFM dan KHM tanpa memperhatikan produktivitas tenaga kerja bukanlah *long run solution* untuk memecahkan masalah tenaga kerja di Indonesia. Menurut John B. Clark (ekonom dari Columbia University), *marginal productivity of labor* lah yang akhirnya akan menentukan besarnya upah yang harus dibayarkan oleh seorang pengusaha kepada pekerjanya. Karena itu, kunci dari persoalan pengupahan di Indonesia adalah bagaimana mengukur produktivitas marginal para pekerja di setiap sektor industri, baik dalam skala regional maupun nasional. Tanpa mengetahui secara pasti produktivitas marginal dari tenaga kerja, kita tidak bisa bicara tentang peningkatan UMR, sebab hal itu akan menjadi buah simalakama. Di satu sisi, menaikkan upah tenaga kerja dengan mengurangi daya saing produk buatan Indonesia tentu bukanlah tujuan dari pemerintah dan pekerja. Di sisi lain, memeras tenaga kerja demi menggempuk kantong pengusaha juga bukanlah tujuan akhir setiap pengusaha. Yang dibutuhkan sekarang adalah suatu media independen yang ditugasi melakukan penelitian secara ilmiah terhadap *marginal productivity of labor* di Indonesia. Penelitian ini menjadi lebih relevan bukan saja dalam rangka mencari model pengupahan yang dapat diterima oleh semua pihak, akan tetapi juga merupakan bahan masukan untuk perencanaan sumber daya manusia Indonesia di waktu yang akan datang.

Penutup

Kenaikkan upah sudah menjadi gejala umum di negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia. Semakin *industrialized* dan makmur suatu negara, maka semakin banyak barang dan jasa yang ditawarkan, dan untuk membelinya maka para pekerja tentu menuntut upah yang lebih tinggi. Ini sudah merupakan *nature* dari proses pembangunan ekonomi suatu negara. Kenaikan UMR yang dicanangkan oleh Pemerintah akan dilakukan secara berkala, tidak dapat dihindari. Sebagian pengusaha tidak keberatan dengan langkah ini dan bahkan sudah melaksanakannya sejak Januari 1995. Tetapi, dalam jangka panjang pada skala nasional kebijakan ini tidak menguntungkan industri sepatu khususnya dan industri padat karya lain pada umumnya. Peningkatan upah harus diiringi dengan peningkatan produktivitas dan akhirnya menuju ke *optimal resource allocation*. Khususnya untuk industri sepatu berarti membuat *"hitech shoes"* dengan nilai FOB yang lebih tinggi. Sebagai informasi tambahan, kehadiran industri sepatu tidak menyebabkan upah tenaga kerja dan standar hidup rendah di negara ini. Rendahnya upah dan standar hidup di negara ini juga tidak mampu diselesaikan oleh industri sepatu itu sendiri. Apa yang bisa dilakukan oleh industri sepatu, dan fakta telah memperlihatkan bahwa industri sepatu telah menciptakan banyak lapangan kerja sementara sambil memperjuangkan kondisi kerja yang lebih baik, upah yang lebih baik dan perlakuan yang pantas bagi pekerja yang bekerja di dalam industri ini.

Daftar Pustaka

1. Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus. *Economics*, edisi ke-4. Mc Graw Hill International, hal 226-229.
2. Then Ngim Fu dan Harjanto Djunaidi (1995). "Kenaikan UMR, Simalakama bagi Pengusaha," *Warta Ekonomi*, No. 36, Tahun VI, 30 Januari.
3. Then Ngim Fu dan Harjanto Djunaidi (1995). "Mengembangkan Hubungan Harmonis Antar Konglomerat - Pengusaha Kecil," *Bisnis Indonesia*, 7 Februari.
4. Then Ngim Fu (1995). "Dumping: Bentuk Proteksi dalam Perdagangan Internasional?" *Bisnis Indonesia*, 10 Maret.
5. Then Ngim Fu (1994). "How to Minimize the Dependency of the Shoe Industry in Indonesia on South Korea." *Forum Manajemen Prasetiya Mulya*, No. 58.
6. Then Ngim Fu (1995). "Kiat Manager Profesional Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja," *Bisnis Indonesia*, 16 Januari.
7. Then Ngim Fu (1994). "Pola Tukang Jahit sebagai Strategi Menuju Industrialisasi," *Bisnis Indonesia*, 12 Oktober.
8. Then Ngim Fu (1994). "Pola Tukang Jahit untuk Menuju Industrialisasi: Sampai Kapan?" *Bisnis Indonesia*, 26 November.

Then Ngim Fu, SE, MBA adalah Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Katolik Unika Atmajaya Jakarta.
